



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana kerja tahunan. Selain itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Potensi tersebut menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang merupakan acuan dan tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) tahunan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah tahun 2013-2018.



Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Bima terutama di Misi ke 4, maka arah kebijakan pembangunan Kota Bima dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan khususnya dibidang pertanian adalah **"Peningkatan Produksi di Bidang Pertanian"**.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional peranan sektor pertanian cukup strategis dan memiliki kaitan kuat di sektor hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta antara lain karena berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi yang dapat membawa perubahan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dalam pemulihan ekonomi masyarakat, pemenuhan bahan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan pembangunan nasional dibidang pertanian difokuskan pada tiga program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Ketiga program utama tersebut diarahkan untuk : (1) Meningkatkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman bahan pangan dan kelembagaan pangan yang bersumber pada budaya lokal; (2) Mengembangkan sistem agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumber daya manusia; serta (3) Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan penguatan modal dan peningkatan pendapatan.

Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis, yaitu keseluruhan kinerja sistem usaha yang saling terkait, saling bergantung dan saling mempengaruhi mulai dari sub



sistem hulu, sub sistem usaha tani (*off farm*), sub sistem hilir (*on farm*) dan sub sistem penunjang yang dikembangkan secara simultan, serasi dan seimbang.

Pengembangan sistem agribisnis cukup penting menyangkut beberapa korelasi sebagai berikut :

1. Pondasi dasar sistem agribisnis belum kokoh, sehingga belum berkembang seperti yang diharapkan;
2. Pendapatan petani masih rendah, baik secara nominal maupun secara relatif dibandingkan sektor lain. Produksi riil tenaga kerja di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain;
3. Terjadi kesenjangan produktivitas dan mutu yang cukup besar sehingga daya saing produk pertanian masih berpeluang untuk ditingkatkan;
4. Lemahnya kelembagaan usaha tani dan berkembangnya kemitraan yang saling menguntungkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Reviu Rencana Strategik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima tahun 2013 – 2018.
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Reviu Rentra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai salah satu upaya merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis serta perumusan program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan sumber-sumber pendanaan yang dimanfaatkan.

Tujuan penyusunan Reviu Rencana Strategik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dokumen sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan selama lima tahun ke depan (tahun 2013 sampai dengan tahun



2018), dan sebagai bahan informasi bagi instansi terkait lainnya dalam merumuskan program-program pembangunan secara terpadu antara instansi di pusat, propinsi dan kabupaten/kota;

- 2) Menyediakan suatu tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- 3) Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Reviu RENSTRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA BIMA
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.2. Sumberdaya Organisasi
 - 2.3. Kinerja Pelayanan
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kota Bima
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kota Bima
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima
 - 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kota Bima



- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN KOTA BIMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN REVIU RPJMD
- BAB VII. P E N U T U P



BAB 2 **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA BIMA**

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

- a. Dinas Pertanian Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian (Perwali No. 58 Tahun 2016)
- b. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 2. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
 3. Pengembangan prasarana pertanian;
 4. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 5. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 6. Pembinaan produksi dibidang pertanian;
 7. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 8. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 10. Pemberian rekomendasi ijin usaha teknis pertanian;
 11. Pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian;
 12. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan



13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bima sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bima (berdasarkan Perwali Kota Bima Nomor 58 tahun 2016) terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 2. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 3. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 4. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.



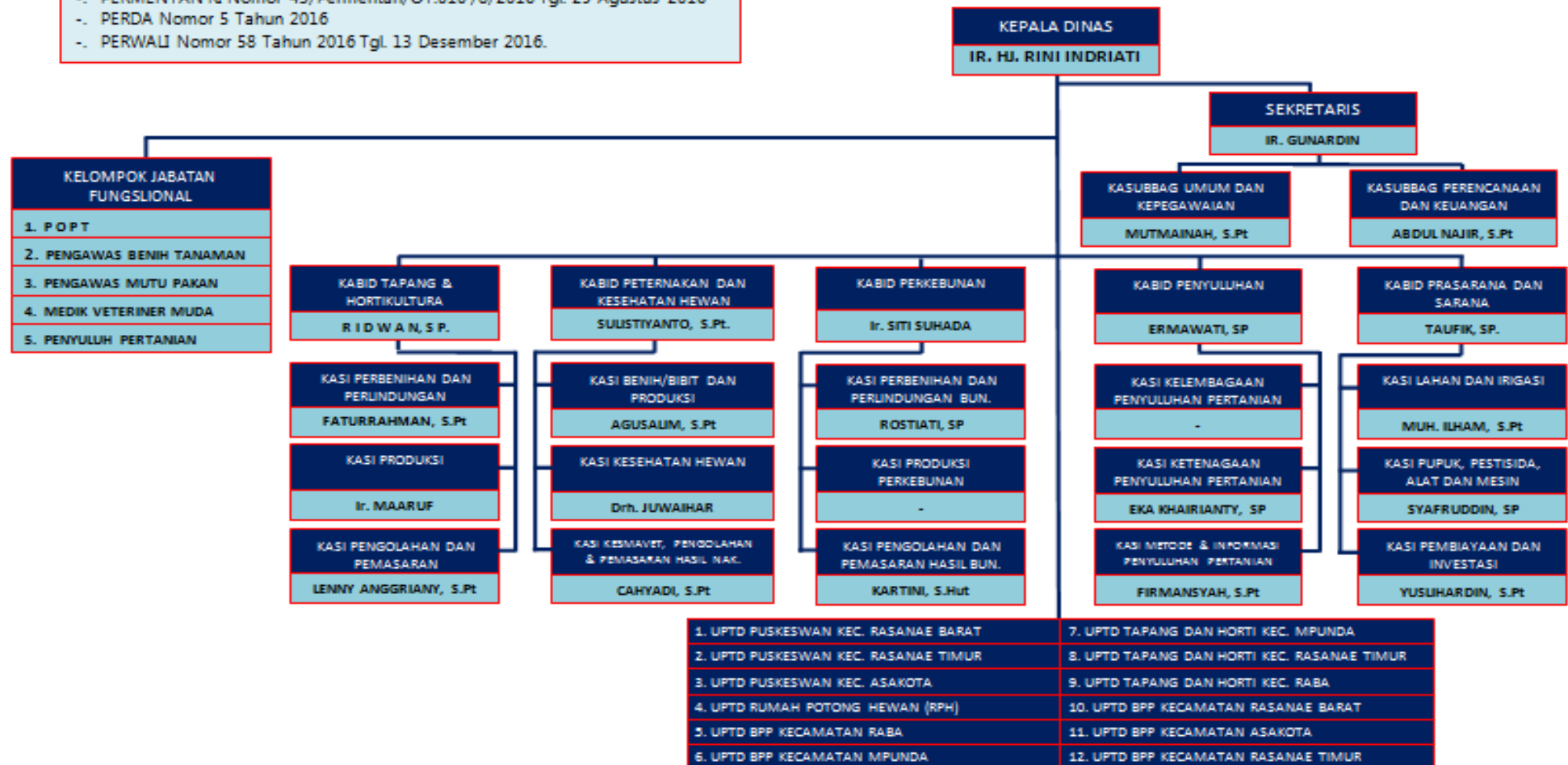
5. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



- PERMANTAN RI Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tgl. 29 Agustus 2016
- PERDA Nomor 5 Tahun 2016
- PERWALI Nomor 58 Tahun 2016 Tgl. 13 Desember 2016.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA BIMA





2.2. SUMBER DAYA ORGANISASI.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur;

Sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun 2013.

No	URAIAN	Jumlah Pegawai Berdasarkan										Ket
		Jenis Kelamin			Pendidikan							
		L	P	JM	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	
1	PNS	42	49	91	1	65	4	14	7	-	-	
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Honor K2	7	4	11	-	4	-	1	5	1	-	
4	THL	10	14	24	-	4	-	2	18	-	-	
5	SMD	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
Jumlah		59	68	127	1	74	4	17	30	1	-	

Tabel 2. Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Pangkat.

No.	Pangkat/golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama , IV/c	1	
2.	Pembina Tk. I, IV/b	1	
3.	Pembina, IV/a	3	
4.	Penata Tk. I, III/d	37	
5.	Penata, III/c	21	
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	12	
7.	Penata Muda, III/a	13	
8.	Pengatur Tk. I, II/d	2	
9.	Pengatur, II/c	-	
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1	
11.	Pengatur Muda, II/a	-	
12.	Honerer	11	
13.	THL + SMD	25	
Jumlah		127	



Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Esselon II/b	1	
2.	Esselon III/a	1	
3.	Esselon III/b	5	
4.	Esselon IVA	26	
5.	Fungsional	32	
6.	Staf	26	
7.	Honoror/ THL	36	
	J u m l a h	127	

2.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana.

Sarana

- Kendaraan dinas : Roda 4 : 4 unit
Roda 2 : 18 unit
- Perlengkapan kantor : Meubelair dan Peralatan Elektronik

Prasarana

- Kantor dinas : 1 unit
- Kantor Puskesmas : 3 unit
- Kantor Unit Pelayanan IB : 1 unit
- Gedung Rumah Potong Hewan : 1 unit
- Kios daging : 1 unit
- Kebun bibit : 283 m²

2.3 KINERJA PELAYANAN

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan sasaran/target renstra periode 2009-2013 dan indikator pelayanan dapat dilihat pada tabel 4, sedangkan anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 5.



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Kebijakan pembangunan pertanian di Kota Bima masih mengalami berbagai tantangan/permasalahan antara lain :

1. Kemampuan dan akses permodalan petani masih lemah, sehingga tidak mampu mengelola usaha taninya yang menghasilkan produk yang berdaya saing dan berorientasi pasar;
2. Pada umumnya petani belum mampu meningkatkan nilai tawar produk pertanian, juga belum mampu menyuarakan kepentingan mereka baik secara ekonomi maupun secara politik;
3. Pengetahuan, keterampilan dan sikap petani untuk penerapan teknologi anjuran masih rendah;
4. Harga komoditi pertanian yang relatif tidak stabil atau fluktuasi harga yang masih tinggi terutama pada saat panen raya;
5. Penggunaan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan belum sesuai anjuran;
6. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana lahan dan air yang masih harus ditingkatkan sehingga produktivitas lahan dan pendapatan petani yang masih rendah;
7. Terbatasnya sumber daya air sebagai air irigasi pertanian;
8. Pengelolaan lahan kering dan miring belum menerapkan sistem konservasi lahan;
9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan konservasi sumber daya alam (SDA) masih rendah;
10. Kesadaran dalam melaksanakan aktifitas pertanian secara berkelompok yang masih kurang;
11. Liberalisasi perdagangan/perdagangan bebas.



12. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi, kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar
13. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting sistem pemeliharaan ternak secara intensif

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah;
2. Adanya program diklat bagi petugas;
3. Adanya koordinasi yang mantap;
4. Adanya kewenangan perencanaan dari bawah (bottom up);
5. Adanya kinerja yang baik dari petugas lapangan;
6. Adanya kelembagaan petani/peternak (kelompok tani ternak) yang dinamis dan maju;
7. Adanya kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil;
8. Tersedianya tenaga kerja terampil dan mekanisasi pertanian;
9. Adanya potensi sumber daya alam yang memungkinkan pengembangan agribisnis;
10. Adanya pasar yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani/peternak;
11. Tersedianya sarana produksi yang mendorong penerapan paket teknologi anjuran;
12. Minat masyarakat untuk berusaha tani cukup tinggi.
13. Persentase lahan sawah 2030 Ha merupakan irigasi dengan IP 1-3 untuk pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.



14. Pangsa pasar besar. Hal ini ditunjang oleh posisi Kota Bima sebagai kota transit yang berada pada segi tiga emas pariwisata (Bali–Komodo–Tanah Toraja);
15. Jalur transportasi lancar, ditunjang oleh adanya sarana terminal dan pelabuhan laut.
16. Jalur telekomunikasi lancar, baik melalui telepon rumah maupun telepon seluler;
17. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan membawa konsekwensi terhadap meningkatnya jumlah permintaan akan produk-produk pertanian, baik produk mentah maupun olahan untuk pasar domestik, regional, nasional maupun ekspor.



BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS

ISU NASIONAL

1. Pembangunan Bidang Pertanian

Lingkungan strategis tingkat internasional yang paling dominan dalam mendorong perubahan struktur perekonomian dan tatanan masyarakat Kota Bima dimasa mendatang sehingga mempengaruhi arah dan sasaran pembangunan pertanian adalah : (a) liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan internasional; (b) perubahan system dan manajemen produksi; (c) perhatian pada perwujudan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan; dan (d) kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan teknologi tinggi.

Dilain pihak, lingkungan strategis tingkat nasional dan lokal yang dominan mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan tatanan masyarakat Kota Bima serta diperkirakan sangat berpengaruh terhadap arah dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan dimasa mendatang adalah : (a) penduduk dan pola permintaan pangan dan bahan baku; (b) terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke pemukiman; (c) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (d) terbatasnya prasarana, sarana, lahan dan air, (e) terbatasnya akses petani terhadap permodalan, serta (f) belum optimalnya sistem perbenihan nasional.

Berbagai faktor tersebut perlu dicermati dalam menyusun kebijakan dan rencana strategis pembangunan pertanian tanaman pangan dan ketahanan pangan kedepan.



2. Pembangunan Bidang Perkebunan

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan;
4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;
5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;
6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;
7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
8. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan;
9. Meningkatkan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Sedangkan sasaran pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDB, Perkebunan 11,41 % (berdasarkan harga berlaku) dan harga konstan 3,14%
2. Keterlibatan tenaga kerja petani perkebunan 20,9 juta orang.
3. Peningkatan Pendapatan Pekebun menjadi US\$1.780/KK/Thn/2 ha
4. Nilai Tukar Petani (NTP) 108,20
5. Penerimaan ekspor US \$ 51,99 milyar



6. Kebutuhan inventasi perkebunan 62,9 triliun bersumber dari APBN 1,773 triliun (2,82%) dan sumber lain seperti APBD, perbankan dan swadaya masyarakat senilai 61,127 triliun (97,18%)

3. Pembangunan Bidang Peternakan

Pembangunan peternakan dihadapkan pada berbagai tantangan dari lingkungan dalam negeri maupun lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan permintaan produk peternakan, penyedia bibit ternak, kualitas bibit, berbagai wabah penyakit ternak, serta tuntutan perubahan manajemen sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan lingkungan global berkaitan dengan liberalisasi perdagangan global dan ketidakadilan perdagangan internasional, perubahan sistem dan manajemen produksi, konsumsi global, tuntutan terhadap perwujudan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (*Millenium, Development Goal*) serta adanya kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan teknologi

Ditengarai kecenderungan peningkatan import daging, sapi bakalan maupun sapi potong tidak hanya semata-mata karena kesenjangan permintaan dan penawaran, tapi disebabkan juga adanya kemudahan dalam pengadaan produk impor (volume, kredit, transportasi) serta harga produk yang lebih murah. Kondisi tersebut menyebabkan peternak lokal tidak mampu bersaing dan kurang bergairah karena harga daging relatif murah.

Usaha dan industri peternakan dalam negeri tidak mampu memproduksi karena ketidakmampuan dalam membiayai produksi dan biaya-biaya lainnya. Dalam jangka panjang masuknya import daging tersebut akan merusak usaha dan industri peternakan nasional. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan terhadap produk impor semakin besar.



ISU REGIONAL

1. Isu-Isu Pembangunan Bidang Pertanian Tanaman Pangan

NTB memiliki keragaman iklim yang menguntungkan bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Posisi NTB berada pada jalur mata rantai pemasaran yang strategis, yaitu dekat dengan sentra Industri Bali dan Jawa, dan dekat dengan NTT sebagai peluang pengembangan pasar beras NTB.

Dengan posisi geografisnya yang strategis dan keragaman modal sosial yang dimilikinya, NTB berpeluang besar menjadi daerah maju yang berdaya saing. Hanya saja untuk mencapai itu, percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal dan mendorong masuknya investasi menjadi kebutuhan mutlak.

Percepatan pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pelayanan prima menjadi salah satu ukuran utamanya. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya aparat pemerintah yang mampu memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Selain itu diperlukan pula aparat yang cakap mendorong sinergitas antara birokrasi, dunia usaha dan masyarakat khususnya di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Percepatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura bisa terealisasi jika adanya dukungan infrastruktur wilayah yang memadai. Kondisi infrastruktur strategis NTB masih belum optimal mendukung pembangunan sector perekonomian daerah khususnya pertanian yang ditunjukkan dengan masih terbatasnya infrastruktur antar wilayah dan antar sektor. Hal tersebut sering menjadi kendala masuknya investasi dibidang pertanian.

Percepatan pembangunan harus selalu berbasis pada konsepsi pembangunan berkelanjutan. NTB yang merupakan provinsi kepulauan sepatutnya memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)



yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dengan orientasi pada keberpihakan pada rakyat miskin.

2. Isu-Isu Pembangunan Bidang Perkebunan

Propinsi NTB telah merumuskan program pembangunan perkebunan berdimensi global, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Secara ekologis berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan salah satu komoditas pertanian yang pertumbuhannya positif terhadap pendapatan devisa negara adalah komoditas perkebunan.

Komoditas perkebunan secara ekonomi mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terutama peluangnya dibidang ekspor, sementara itu kebijakan dasar pembangunan perkebunan mengarah kepada upaya menggerakkan dan memfasilitasi pengembangan produksi perkebunan yang berorientasi pasar melalui pemberdayaan dan penguatan hilir guna memperoleh nilai tambah dan daya saing dengan dukungan partisipasi masyarakat, beberapa komoditas unggulan di sub sektor perkebunan di wilayah NTB yang saat ini dibudidayakan antara lain kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa. Komoditas yang dibudidayakan ini, tentunya perlu didukung oleh upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan, serta meningkatkan nilai tambah dari produk-produk perkebunan tersebut.

Secara garis besar, masalah-masalah pembangunan perkebunan yang dihadapi saat ini mencakup dua kelompok permasalahan. Selain permasalahan struktural yang berkaitan dengan program pelaksanaan



pembangunan perkebunan, juga permasalahan fungsional yang terkait dengan aspek pembangunan perkebunan, yang meliputi aspek budidaya dan produktivitas, kemampuan dan pematapan SDM petani dan petugas lapangan, penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kemitraan, oleh karenanya perlu lebih memperhatikan aspek-aspek kewilayahan dan sumber daya secara keseluruhan.

3. Isu-Isu Pembangunan Bidang Peternakan

Grand Strategi (Strategi) dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTB sebagai Bumi Sejuta Sapi adalah :

1. Rumpun Hijau berintegrasi dalam Pengembangan Bumi Sejuta Sapi (BSS).
2. Sapi merupakan pengungkit komoditi ternak lain dan komoditi rumpun hijau di NTB.



3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA BIMA

Tabel 6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Bima

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Dispertannak
			Internal (kewenangan Dispertannak)	Eksternal (diluar Kewenangan Dispertannak)	
1	2	3	4	5	6
<p><u>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. 2. Pengembangan sumber daya air. 3. Pemanfaatan potensi lahan kering. 4. Permodalan petani. 5. Kapasitas kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A, Koptan/ Gapoktan). 6. Penggunaan pupuk anorganik sesuai dosis rekomendasi. 7. Pengembangan Tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif. 2. Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air. 3. Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal. 4. Permodalan petani dalam mendukung usahatani masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas. 5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A, Koptan/ Gapoktan). 6. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis 	<p>SOP PERWALI PERDA PERMENTAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rancangan payung hukum (PERDA, dll) berhubungan dengan Lahan Abadi 2. Penyediaan Program dan Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan serta Pengembangan Sumber Daya Lahan dan Air 3. Pembinaan Kelompok tani dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Payung Hukum (PERDA dll) tentang Lahan Abadi 2. Penyediaan Anggaran Untuk Pembinaan dan Pelatihan bagi petani peternak dan aparatur serta Pengembangan Sumber Daya Lahan dan Air 3. Penyediaan Sarana Transportasi bagi tenaga teknis lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian 2. Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam 3. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Dispertannak
			Internal (kewenangan Dispertannak)	Eksternal (diluar Kewenangan Dispertannak)	
1	2	3	4	5	6
8. obatan/empon-empon), dan perkebunan Produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP). 9. Fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani BIDANG PETERNAKAN 1. Program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah. 2. Sistem/model pemberdayaan peternakan.	rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah. 7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan. 8. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging. 9. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani. 1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah. 2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat. 3. Belum adanya kebijakan penguatan		ternak 4. Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan petani dan peternak 5. Memperbanyak lembaga penyanggah untuk menstabilkan harga komoditi pertanian seperti LUEP dan LDPM. 6. Sosialisasi dan pengawasan keamanan produk bahan makanan asal ternak 7. Menjalin kemitraan dengan pengusaha dibidang pertanian dan peternakan dalam upaya		mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian. 4. Kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran 5. Menurunnya produksi dan kualitas Tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan/empon-empon). 6. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi. Kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Dispertannak
			Internal (kewenangan Dispertannak)	Eksternal (diluar Kewenangan Dispertannak)	
1	2	3	4	5	6
<p>3. Status lahan penggembalaan ternak.</p> <p>4. Program NTB Bumi Sejuta Sapi.</p> <p>5. Pendataan populasi ternak.</p> <p>6. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</p> <p>7. Perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</p> <p>8. Angka kelahiran ternak masih rendah dan kematian anak (pedet) masih tinggi.</p> <p>9. Kasus penyakit hewan menular.</p> <p>10. Transformasi teknologi (breeding, penyakit).</p> <p>11. Kesehatan masyarakat veteriner dan penyediaan produk yang ASUH</p> <p>12. Sistim budidaya oleh</p>	<p>status lahan penggembalaan ternak rakyat.</p> <p>4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung program NTB Provinsi Bumi Sapi.</p> <p>5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.</p> <p>6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</p> <p>7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</p> <p>8. Angka kelahiran ternak masih rendah (54,2% dari induk produktif) dan angka kematian anak masih tinggi (12,5% dari pedet).</p> <p>9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.</p> <p>10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.</p> <p>11. Kurangnya terhadap kesehatan</p>		<p>peningkatan produksi dan produuktifias pertanian, perkebunan dan peternakan.</p>		<p>7. Minimnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak.</p> <p>8. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas</p> <p>9. Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dan peternakan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.</p>



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Dispertannak
			Internal (kewenangan Dispertannak)	Eksternal (diluar Kewenangan Dispertannak)	
1	2	3	4	5	6
masyarakat. 13. Pemasaran ternak masyarakat. 14. Akses permodalan bagi peternak. 15. Orientasi Usaha peternakan masyarakat. 16. Keamanan usaha peternakan. 17. Kelembagaan kelompok. 18. Administrasi kelompok. 19. Aturan/regulasi/awig-awig kelompok. 20. Kandang kolektif. 21. Partisipasi pengusaha dalam usaha peternakan.	masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan tehnologi pasca panen. 12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan. 13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak. 14. Akses permodalan sulit dan belum ada kredit khusus untuk sapi. 15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata. 16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak maling dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging , razia daging legal dan				



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Dispertannak
			Internal (kewenangan Dispertannak)	Eksternal (diluar Kewenangan Dispertannak)	
1	2	3	4	5	6
	<p>ilegal dan regulasi).</p> <p>17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar, terutama disebabkan masalah tanah & pamswakarsa.</p> <p>18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).</p> <p>19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).</p> <p>20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.</p> <p>21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produks, hanya menunggu hasil.</p>				



3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Tabel 7. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dispertannak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Misi : Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian 2. Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam 3. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian. 4. Kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran 5. Menurunnya produksi dan kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian 2. Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman 3. Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun 4. Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim 5. Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik. 6. Sumber pendanaan yang masih minim untuk pengadaan sarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan abadi. 2. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman 3. Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok 4. Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.



		<p>Tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan/empon-empon).</p> <ol style="list-style-type: none">6. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi. Kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar7. Minimnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak.8. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas9. Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dan peternakan dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan peternakan.	<ol style="list-style-type: none">7. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.	
--	--	--	--	--



3.3. TELAHAH RENSTRA

Table 8. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Dispertannak Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar), produksi hortikultura (mangga, bawang merah, kacang panjang, garoso, pisang), produksi peternakan (sapi, kambing, ayam dan itik/bebek) dan produksi perkebunan (jambu mente, tembakau, kelapa);	1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian 2. Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian 2. Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman 3. Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun 4. Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim 5. Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik. 6. Sumber pendanaan yang masih minim untuk pengadaan sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan maupun untuk upaya peningkatan kualitas dan	1. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan abadi. 2. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman 3. Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok 4. Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.
2.	Meningkatnya penggunaan benih dan bibit unggul bermutu pada tiga komoditi utama pertanian yakni padi, jagung dan kedelai, perkebunan serta peternakan;	3. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian.		
3.	Meningkatnya pusat penangkaran benih tanaman pangan, perkebunan dan pembibitan ternak;	4. Kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran		
4.	Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam budidaya tanaman;	5. Menurunnya produksi dan kualitas Tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan/empon-empon).		
5.	Tersedianya pupuk bersubsidi baik organik maupun pupuk anorganik untuk memenuhi kebutuhan tanaman;			
6.	Meningkatnya jumlah dan kualitas			



7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	pelaku usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; Menurunnya tingkat serangan Organisma Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan; Meningkatnya produksi daging, telur dan hasil olahan; Berkurangnya penyebaran penyakit menular hewan; Meningkatnya populasi ternak (ternak besar, kecil dan unggas); Meningkatnya produktivitas lahan kering melalui optimalisasi lahan dan perbaikan sumber daya air; Terpeliharanya sarana dan prasarana irigasi melalui kegiatan pengolahan lahan dan air (PLA); Tersedianya produk-produk tanaman pangan, perkebunan dan peternakan unggulan daerah; Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik air tanah maupun air permukaan untuk tanaman dan peternakan; Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi tingkat usahatani dan jaringan irigasi pedesaan.	6. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi. Kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar 7. Minimnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak. 8. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas 9. Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dan peternakan dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan peternakan.	kapasitas sumber daya aparatur 7. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.	
--	--	---	--	--



3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tabel 9. Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi Dispertannak Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Kota Bima sebagai sentra produksi tanaman pangan dan peternakan yang berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian2. Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam3. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian.4. Kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran5. Menurunnya produksi dan kualitas Tanaman hortikultura (buah-buahan,	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian2. Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman3. Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun4. Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim5. Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik.6. Sumber pendanaan yang masih minim untuk pengadaan sarana transportasi	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan abadi.2. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman3. Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok4. Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.



		<p>sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan/empon-empon).</p> <ol style="list-style-type: none">6. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi. Kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar7. Minimnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak.8. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas9. Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dan peternakan dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan peternakan.	<p>bagi tenaga teknis lapangan maupun untuk upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur</p> <ol style="list-style-type: none">7. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.	
--	--	---	--	--



Tabel 10. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Dispertannak Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya lahan pertanian produktif yang berkelanjutan2. Terwujudnya sumber-sumber mata air sebagai air irigasi pertanian3. Terwujudnya pemetaan wilayah sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	<ol style="list-style-type: none">1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian2. Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam3. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian.4. Kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran5. Menurunnya produksi dan kualitas Tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan/empon-empon).6. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi. Kerbau) sehingga produksi daging yang	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian2. Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman3. Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun4. Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim5. Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik.6. Sumber pendanaan yang masih minim untuk pengadaan sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan maupun untuk upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan abadi.2. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman3. Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok4. Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.



		<p>dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar</p> <ol style="list-style-type: none">7. Minimnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak.8. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas9. Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dan peternakan dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan peternakan.	<ol style="list-style-type: none">7. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.	
--	--	--	--	--

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
2. Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam;
3. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian;
4. Kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran;
5. Menurunnya produksi dan kualitas Tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan/empon-empon);
6. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi. Kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar;
7. Minimnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak;
8. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas;
9. Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dan peternakan dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan peternakan.



BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI DINAS PERTANIAN KOTA BIMA

Visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah ***"Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera"***, dan dalam menunjang pencapaian visi tersebut, disusunlah visi Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2013-2018 yaitu ***"Terwujudnya pembangunan pertanian yang maju dan efisien menuju masyarakat Kota Bima yang sejahtera"***

Dengan rumusan visi tersebut di atas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018) diharapkan kondisi pembangunan pertanian di Kota Bima mengalami perubahan dan lompatan secara signifikan yang diindikasikan oleh 2 (dua) indikator keberhasilan utama, yaitu :

1. Tercapainya swasembada dan swesembada berkelanjutan yang ditandai makin meningkatnya produktivitas lahan dan produksi komoditi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
2. Masyarakat yang maju dan mandiri, ditandai dengan adanya kemajuan dalam hal tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan pendapatan petani dan pelaku usaha pertanian serta ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka **mis**i pembangunan pertanian Kota Bima adalah "Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian melalui pengembangan sarana dan prasarana,



penerapan teknologi serta menumbuhkembangkan usaha-usaha agribisnis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan hasil produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi”.



4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN KOTA BIMA

Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima

Misi : Menjadikan Masyarakat SEJAHTERA Berbasiskan Pembangunan Ekonomi Lokal Dengan Penyediaan Infrastruktur Yang Memadai dan Diikuti Perluasan Akses Ekonomi Dalam Upaya Penguatan Struktur Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dengan Dukungan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis		Target Kinerja									
			Uraian	Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya Swasembada Pangan di Kota Bima	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	72.635	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)										
				- Padi (GKP)	40.590	Ton	44.649	Ton	49.114	Ton	54.025	Ton	59.428	Ton
				- Jagung (PK)	2.959	Ton	3.551	Ton	4.261	Ton	5.113	Ton	6.136	Ton
				- Kedelai (BK)	2.041	Ton	2.245	Ton	2.469	Ton	2.716	Ton	2.987	Ton
				- Kacang Tanah (BK)	254	Ton	305	Ton	366	Ton	440	Ton	528	Ton
				- Kacang Hijau (BK)	7	Ton	9	Ton	10	Ton	12	Ton	15	Ton
				- Ubi Kayu (UB)	1.649	Ton	1.979	Ton	2.374	Ton	2.849	Ton	3.419	Ton
	- Ubi Jalar (UB)	84	Ton	92	Ton	101	Ton	111	Ton	122	Ton			
	Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	204,73	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan (Ton)										
				- Tembakau	-	-	-	-	-	-	3,40	Ton	3,40	Ton
				- Jambu Menté	-	-	-	-	-	-	173,84	Ton	173,84	Ton
	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	2.468	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Peternakan (Ton)										
				- Produksi Daging	1.138	Ton	1.332	Ton	1.558	Ton	1.823	Ton	2.133	Ton
				- Produksi Kulit	30	Ton	34	Ton	39	Ton	45	Ton	51	Ton
				- Produksi Telur	194	Ton	214	Ton	235	Ton	258	Ton	284	Ton
Meningkatnya Pendapatan Petani		Rata-rata pendapatan petani padi	17	Juta /Ha	18	Juta /Ha	20	Juta /Ha	22	Juta /Ha	24	Juta/ Ha		



Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis		Target Kinerja									
			Uraian	Indikator	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
			Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Trampil	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran	-	-	-	-	-	-	45	%	50	%



4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN KOTA BIMA

Tabel 12. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kota Bima

MISI : Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian melalui pengembangan sarana dan prasarana, penerapan teknologi serta menumbuhkembangkan usaha-usaha agribisnis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan hasil produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.		
No.	Strategi	Kebijakan
1	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman melalui pendekatan pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (SL-PHT, SL-PTT) yang mengacu pada budidaya tanaman sehat dan GAP/SOP;- Pengembangan pemupukan berimbang dan pengembangan pupuk organik;- Pengembangan Alsintan;- Pengendalian OPT dan DFI;- Pendistribusian bibit/benih unggul kepada masyarakat;- Pengembangan infrastruktur pertanian;- Pengembangan pakan ternak;- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular.	Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan usaha budidaya masyarakat petani dan peternak
2	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan kelembagaan perbenihan sebagai sentra-sentra produksi.- Pengembangan kelembagaan keuangan mikro bagi usaha tani dan ternak- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha tani ternak	Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan peternak dalam pemanfaatan dan penerapan usaha budidaya sesuai anjuran
3	Penerapan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah lingkungan.	Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah lingkungan



No.	Strategi	Kebijakan
4	Pemetakan/pengumpulan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dibidang pertanian dan peternakan- Peningkatan optimalisasi lahan dan perbaikan sumber daya air- Peningkatan rehabilitasi sarana dan prasarana dibidang pertanian dan peternakan
5	Mendorong berkembangnya usahatani yang berorientasi agribisnis dengan menghasilkan komoditi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang memiliki daya saing tinggi dan berorientasi pasar	Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
6	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam penyediaan daging yang ASUH dikonsumsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk bahan makanan asal hewan



BAB 5 **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima dalam kurun waktu tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2013-2018 mengacu pada VISI dan MISI Dinas Pertanian Kota Bima dan RPJMD Kota Bima dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima, visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Kehutanan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Rencana Tata Ruang dan Isu-Isu Strategis yang berkembang.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik;
 - 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 1.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 1.8. Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan;
 - 1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1.12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 1.13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah; dan
 - 1.14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - 2.1. Pembangunan Gedung Kantor;
 - 2.2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2.3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2.4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 2.5. Pengadaan Meubelair;
 - 2.6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor;
 - 2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2.8. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor; dan
 - 2.9. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - 3.2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
 - 3.3. Pengadaan Pakaian KORPRI; dan
 - 3.4. Pengadaan Pakaian Olahraga.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
 - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - 4.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4.3. Konsultasi dan Studi Banding; dan
 - 4.4. Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - 5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 5.4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 5.5. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD.

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan :
 - 6.1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;
 - 6.2. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
 - 6.3. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani;
 - 6.4. Pelaksanaan PEDANA/PENAS dan Kontak Tani Andalan; dan
 - 6.5. Pelaksanaan Lomba Bagi Kelompok Tani Dan Petani, Kelompok PUAP Serta Pekarangan.

7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan :
 - 7.1. Penyusunan Database Potensi Produk Pangan;
 - 7.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian;
 - 7.3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 7.4. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija;
 - 7.5. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering



- 7.6. Pengembangan Perbibitan/Perbenihan;
 - 7.7. Pengembangan Sistem Informasi Pasar;
 - 7.8. Pengembangan Teknologi Budidaya;
 - 7.9. Pengembangan Teknologi Pascapanen;
 - 7.10. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian;
dan
 - 7.11. Pengembangan Tanaman Sayur-Sayuran.
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, dengan kegiatan :
 - 8.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
 - 8.2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah; dan
 - 8.3. Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Akan Dipasarkan.
 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, dengan kegiatan :
 - 9.1. Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna;
 - 9.2. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
 - 9.3. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna; dan
 - 9.4. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam.
 10. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan kegiatan :
 - 10.1. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - 10.2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian;
 - 10.3. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian; dan
 - 10.4. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian.
 11. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan :
 - 11.1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
 - 11.2. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan; dan
 - 11.3. Penyusunan program penyuluhan pertanian.
 12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan kegiatan :
 - 12.1. Pendataan Masalah Peternakan;
 - 12.2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
 - 12.3. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah;
 - 12.4. Pencacahan dan Pengkartuan Ternak;
 - 12.5. Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan; dan



- 12.6. Pengendalian dan Penertiban Ternak.
13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 13.1. Pembibitan dan Perawatan Ternak;
 - 13.2. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat;
 - 13.3. Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak;
 - 13.4. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak;
 - 13.5. Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak;
 - 13.6. Pengembangan Agribisnis Peternakan; dan
 - 13.7. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan.
14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan :
 - 14.1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah; dan
 - 14.2. Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan Yang Akan Dipasarkan.
15. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan kegiatan :
 - 15.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna;
 - 15.2. Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 15.3. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada di bawah ini :



BAB 6 **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tabel 14. Indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Bima yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0 (2013)	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)							
			- Padi (GKP)	36.900 Ton	40.590	44.649	49.114	54.025	59.428	59.428
			- Jagung (PK)	2.466 Ton	2.959	3.551	4.261	5.113	6.136	6.136
			- Kedelai (BK)	1.855 Ton	2.041	2.245	2.469	2.716	2.987	2.987
			- Kacang Tanah (BK)	212 Ton	254	305	366	440	528	528
			- Kacang Hijau (BK)	6 Ton	7	9	10	12	15	15
			- Ubi Kayu (UB)	1.374 Ton	1.649	1.979	2.374	2.849	3.419	3.419
			- Ubi Jalar (UB)	76 Ton	84	92	101	111	122	122



Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0 (2013)	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan (Ton)							
			- Tembakau	3,30 Ton	-	-	-	3,40	3,40	3,40
			- Jambu Menté	168,78 Ton	-	-	-	173,84	173,84	173,84
			- Kelapa	26,69 Ton	-	-	-	27,49	27,49	27,49
		Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Peternakan (Ton)							
			- Produksi Daging	973 Ton	1.138	1.332	1.558	1.823	2.133	2.133
			- Produksi Kulit	26 Ton	30	34	39	45	51	51
			- Produksi Telur	177 Ton	194	214	235	258	284	284
		Meningkatnya Pendapatan Petani	Rata-Rata Pendapatan Petani Padi (Juta/Ha)	16 Juta/Ha	17	18	20	22	24	24
		Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran (%)	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran (%)	24 %	-	-	-	45	50	50



BAB 7 **PENUTUP**

Rencana Strategik Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2013-2018, akan dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif semua pihak, kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan disemua tingkatan serta terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kota Bima, Januari 2017

Kepala Dinas,

IR. HJ. RINI INDRIATI

NIP. 19650705 199103 2 018